BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon, hasil tambang dan berbagai sumberdaya lainnya yang bisa kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia. Hutan juga merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat *tangible* yang dirasakan secara langsung, maupun *intangible* yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat perlindungan dan pengaturan tata air, dan pencegahan erosi. (Reksohadiprojo, 2000).

Keberadaan hutan, dalam hal ini daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan (Reksohadiprojo, 2000).

Pembangunan hutan di samping usaha-usaha peningkatan kelestarian hutan, juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan serta pelestarian hutan. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan berarti pengentasan kemiskinan (Sudiono, 1995).

Di Pulau Jawa degradasi potensi hutan dan kualitas sumberdaya hutan akibat pengelolaan yang sentralistis ternyata tidak menjamin prinsip-prinsip kelestarian hutan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di lingkungan departemen kehutanan ini tidak berdaya menghadapi penjarahan dan pencurian kayu di hutan-hutan Pulau Jawa yang marak seiring dengan bergulirnya reformasi. Ini merupakan buah dari manajemen pengelolaan hutan selama ini yang tidak melibatkan secara penuh masyarakat di sekitar hutan. Ini jelas, produk dari sebuah sistem pengelolaan hutan yang bersifat sentralistis dan arogan (Muhtadi, 2002).

Pengelola merasa bahwa masyarakat yang sebenarnya harus dilibatkan dalam pelestarian hutan, tidak berhak serta mengelola hutan. Hutan adalah milik negara yang harus di awasi dengan pendekatan keamanan. Selama sepuluh tahun sistem itu berjalan,

muncul kecemburuan sosial yang amat tajam dari masyarakat, tidak saja mereka yang tinggal di sekitar hutan, tetapi pihak-pihak yang merasa bahwa sistem pengelolaan hutan itu tidak adil (Muhtadi, 2002).

Kecemburuan itu makin membumbung tinggi dan akhirnya meledak pada era reformasi. Memburuknya kondisi hutan antara lain juga tidak diimbangi dengan kemampuan membuat hutan tanaman yang baik dan memadai sesuai kebutuhan pasar industri. Sejak tahun 1985-an, secara nasional pembangunan hutan tanaman industri (HTI) sampai saat ini hanya sekitar 2 juta hektar dari target 6,2 juta hektar pada satu pelita saja. Kuantitas dan kualitas sumberdaya hutan Indonesia terutama hutan alam di luar Pulau Jawa, berubah sangat cepat dan terus memburuk dari tahun ke tahun (Muhtadi, 2002).

Penyebab utamanya adalah praktik penebangan tanpa izin (illegal logging), di samping karena perambahan (forest encroachment), peladangan berpindah (shifting cultivation), kebakaran hutan (forest fires), serta sebabsebab lainnya. Degradasi hutan juga dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat dalam penetapan sistem rente ekonomi kayu bulat atau pungutan-pungutan hasil kayu yang nilainya tidak sebanding dengan nilai hutan atau kayu yang di tebang, menyebabkan terjadinya penebangan yang berlebihan (over cutting).Praktik penebangan liar telah pula memacu terjadinya degradasi moral bangsa atau aparat dan masyarakat umum (Muhtadi, 2002). .

Dalam kaitan ini perlu ada perubahan paradigma bahwa memperkuat masyarakat adalah (social investment), dan bukan beban sosial (social cost). Tindakan investasi sosial dalam banyak kasus di bidang kehutanan terbukti mampu mendukung keberlanjutan sistem pengelolaan sumberdaya dan investasi yang ada. Menyadari kekeliruan dalam pengelolaan hutan itu perhutani berupaya meluncurkan program pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan PHBM. Masyarakat berperan dalam pengelolaan hutan sehingga mereka mendapat bagian baik dari hasil kayu maupun dari hasil non kayu (Muhtadi, 2002).

Tentang gangguan dan kerawanan hutan, perhutani telah melakukan berbagai upaya dalam menanganinya. Namun sampai saat ini dapat dikatakan belum optimal. Hal ini tidak lepas dari anggapan bahwa pengamanan hutan semata-mata hanya menjadi tanggung jawab perhutani sendiri. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dipandang perlu adanya peran serta dari berbagai pihak terkait dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat. Mengingat, hutan selain aset negara yang bernilai tinggi, juga memiliki

fungsi ekologis dan sosial. Masalah hutan menjadi tanggung jawab semua pihak (Hanafi, 2004).

Meskipun sering terjadi penjarahan kayu hutan tetapi pihak perhutani masih memiliki aset hutan jati yang masih bisa diandalkan untuk menghidupi perusahaan dan kelestarian hutan. Agar sumberdaya hutan itu tidak dicuri, perhutani melakukan pengembangan Desa Model PHBM dengan membentuk LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dengan program bagi hasil tebangan kayu dan getah (Hanafi, 2004).

Penduduk Kabupaten Jombang terutama yang berada di sekitar kawasan hutan banyak yang memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber penghasilan. Salah satunya adalah ketergantungan dari satu generasi ke generasi lainnya terhadap hasil hutan. Sebagian besar kehidupan masyarakat yang tergantung dari hutan menggabungkan kegiatan berladang dan berkebun dengan menanam Palawija seperti Padi, Jagung, Kacang Tanah, Ketela Pohon. Total kawasan hutan yang masuk wilayah Kabupaten Jombang yang meliputi wilayah Kecamatan Plandaan, Kabuh, Kudu, Ngusikan, Bareng, Mojoagung, Mojowarno dan Wonosalam yang mencakup 31 Desa Hutan, pada wilayah Desa Hutan tersebut 90% bekerja pada sektor Pertanian.

Tahun 2006, dari data Perum Perhutani KPH Jombang, sekitar 200 hektar hutan di Kecamatan Wonosalam yang rusak berat dan perlu ditangani secara serius. Rusaknya hutan tersebut menyebabkan degradasi dan deforestasi. Apabila kondisi kawasan hutan tersebut tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan akan mengancam keseimbangan lingkungan di kawasan hutan dan kawasan budidaya di dataran yang lebih rendah.

Penyebab rusaknya Sumber Daya Hutan (SDH) ini kemungkinan merupakan akibat dari kelalaian manajemen kegitan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), perladangan liar yang tidak terkendali dan kondisi masyarakat sekitar hutan yang miskin serta illegal logging, Kerusakan dan penjarahan hutan juga terjadi di kawasan hutan Wonosalam.

Menghadapi masalah tersebut, Mekanisme perencanaan pengelolaan hutan perlu melibatkan masyarakat sekitar hutan tergantung kepada kondisi spesifik di masing-masing lokasi hutan, serta pemahaman masyarakat tentang fungsi lindung yang umumnya terbatas. Kemudian pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan sangat dibutuhkan agar fungsi ekologi hutan tetap terjaga.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kurangnya pemahaman masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan produksi agar tetap bisa dimanfaatkan sampai masa mendatang, dengan masih terjadinya penjarahan hutan di Desa Wonosalam.

   Maraknya kegiatan illegal logging tang terjadi di Desa Wonosalam dapat dilihat pada data tabel 4.10 sampai tabel 4.14 yang menyatakan tentang pengungkapan kasus illegal ligging dari Polres Jombang pada tahun 2008.

Tabel 1.1 Pengungkapan Kasus Illegal Loging Polres Jombang Tanggal 09 Pebruari 2008 S/D 15 Pebruari 2008

Kesatuan	Waktu	Tkp	Tersangka	Barang bukti	Proses Sidik
Sek Wonosalam	Minggu, 110 peb 2008, jam. 09.00 wib Lp/01/ii/2008/polsek 10 peb 2008	Dsn. Tegal rejo, Jarak, Wonosalam, Jombang	Suratno, 43 th, tani, dsn. Tegal rejo, Jarak, Wonosalam, Jombang	49 lembar papan jenis pinus	Dalam proses sidik
Sek Wonosalam	Minggu, 10 peb 2008 jam. 16.00 wib Lp/02/ii/2008/polsek 10 peb 2008	Dsn. Tegal rejo, Jarak, Wonosalam, Jombang	Waris, 32 th, tani, dsn. Tegal rejo, Jarak, Wonosalam, Jombang	6 batang pohon pinus berbagai ukuran	Dalam proses sidik

Sumber: Perhutani, 2008

Tabel 1.2 Pengungkapan Kasus Illegal Loging Polres Jombang Tanggal 08 Maret 2008 S/D 14 Maret 2008

Kesatuan	Waktu	Tkp	Tersangka	Barang bukti	Proses Sidik
Sek Wonosalam	Jum'at, 29 peb 2008 di lapkan sabtu, 8 maret 2008 Lp/04/iii/2008/polsek 8 maret 2008	Dsn. Sidolegi, ds. Sumberejo, Wonosalam, Jombang	**Marsup,** 28 th, tani, dsn. Sidolegi, ds. Sumberejo, Wonosalam, Jombang	14 batang kayu sengon laut berbagai ukuran	Dalam proses sidik

Sumber: Perhutani, 2008

Tabel 1.3 Pengungkapan Kasus Illegal Loging Polres Jombang Tanggal 26 April 2008 S/D 02 Mei 2008

Kesatuan	Waktu	Tkp	Tersangka	Barang bukti	Proses Sidik
Sek Wonosalam	Kamis, 1 mei 2008 jam. 06.30 wib Lp/08/iv/2008/polsek 1 mei 2008	Hutan Carangwulung, Wonosalam, Jombang	Sunari, 64 th, tani, dsn. Segunung, ds. Carangwulung, Wonosalam, Jombang	8 batang kayu mahoni berbagai ukuran dan 2 batang kayu nangka	Dalam proses sidik

Sumber: Perhutani, 2008

Tabel 1.4 Pengungkapan Kasus Illegal Loging Polres Jombang Tanggal 07 Juni 2008 S/D 13 Juni 2008

Kesatuan	Waktu	Tkp	Tersangka	Barang bukti	Proses Sidik
Sek Wonosalam	Rabu, 11 juni 2008, jam. 04.00 wib Lp/11/vi/2008/polsek 11 juni 2008	Dsn. Maduro, ds. Panglungan, Wonosalam, Jombang	1. Sutaji, 40 th, tani, dsn. Maduro, ds. Panglungan, Wonosalam, Jombang 2. Tumariono, 33 th, tani, dsn. Maduro, ds. Panglungan, Wonosalam, Jombang	23 ikat kayu bakar, 2 buah peck, dan sepeda motor	Proses sidik

Sumber: Perhutani, 2008

Tabel 1.5 Pengungkapan Kasus Illegal Loging Polres Jombang Tanggal 11 Oktober 2008 S/D 17 Oktober 2008

Kesatuan	Waktu	Tkp	Tersangka	Barang bukti	Proses Sidik
Sek bandar kdm	Kamis, 16 oktober 2008, jam. 14.00 wib Lp/69/x/2008/polsek 16 oktober 2008		Zainuri bin badrun, 38 th, tani, ds. Puncangsimo, bandar kdm, Jombang	Satu btang kayu jati ukuran 12x12x250	Proses sidik
Sek perak	Senin, 13 oktober 2008, jam. 00.30 wib, Lp/39/x/2008/polsek 13 oktober 2008		Subari, 50 th, sopir, ds. Galendowo, Wonosalam, Jombang	Satu unit ruk no. Pol : n-8044-uk 36 batang kayu waru gunung	Proses sidik

Sumber: Perhutani, 2008

2. Meningkatnya luasan lahan kritis di Kecamatan Wonosalam karena penjarahan hutan dan perubahan penggunaan lahan dari 742,46 Ha pada tahun 2002 menjadi 751 Ha pada tahun 2009
3. Tingginya jumlah rumah tangga miskin di Desa Hutan Wonosalam mencapai 21,04 % menurut RTRW Kabupaten Jombang 2010-2030.
4. Perlunya pengelolaan hutan dengan memberdayakan masyarakat desa hutan untuk menjaga kelestarian hutan

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi Masyarakat Desa Hutan (MDH) di kawasan hutan Desa Wonosalam Kab Jombang?
2. Bagaimana kondisi hutan dan pemanfaatan hutan produksi berdasarkan arahan penggunaan lahan sesuai dengan karakteristik Desa Wonosalam?
3. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa Wonosalam, Perum Perhutani dan Dinas Kehutanan dalam pengelolaan sumber daya hutan?
4. Bagaimana arahan pengelolaan hutan bersama masyarakat desa hutan di Desa Wonosalam Kabupaten Jombang?

1.4 Tujuan, Sasaran dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan

1. Mengetahui karakteristik sosial ekonomi Masyarakat Desa Hutan (MDH) di kawasan hutan Desa Wonosalam Kab Jombang.
2. Mengetahui kondisi hutan dan pemanfaatan hutan berdasarkan fungsinya sesuai dengan arahan penggunaan lahan Desa Wonosalam.
3. Mengetahui partisipasi Masyarakat Desa Wonosalam, Perum Perhutani dan Dinas Kehutanan dalam pengelolaan sumber daya hutan.
4. Bagaimana arahan pemanfaatan hutan produksi di Desa Wonosalam Kabupaten Jombang.

1.4.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari penelitian Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Di Desa Wonosalam Kabupaten Jombang, yaitu untuk mengatasi masalah peningkatan lahan kritis yang terdapat di Desa Wonosalam dan meningkatkan pengelolaan yang optimal dengan pengelolaan yang bersinergi antara masyarakat Desa Hutan Wonosalam dengan Perum Perhutani dan Dinas Kehutanan.

1.4.3 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jombang, hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program kawasan hutan Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kab. Jombang.
2. Bagi masyarakat, dapat membantu agar menciptakan suatu kawasan hutan dengan kualitas yang baik serta menginformasikan lokasi rawan bencana yang ada di kawasan hutan Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kab. Jombang.

3. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai acuan untuk studi selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan masalah pengelolaan hutan dengan berbasis masyarakat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Materi

Tugas akhir ini dibatasi hanya untuk mengkaji pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan mempertimbangkan persepsi masyarakat desa hutan, perum perhutani dan dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Jombang. Ruang lingkup materi dalam tugas akhir ini akan mengkaji beberapa komponen-komponen, antara lain adalah :

1. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Hutan
2. Karakteristik Fisik Hutan Desa Wonosalam
3. Partisipasi Masyarakat Desa Hutan terhadap pengelolaan hutan

Dari ketiga komponen diatas dilakukan analisa lebih lanjut untuk mengetahui arahan pengelolaan hutan Desa Wonosalam dengan partisipasi masyarakat desa hutan.

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah yang akan diambil dalam studi ini adalah Desa Wonosalam, yang terletak di Kecamatan Wonosalam dan berada di bagian selatan Kabupaten Jombang. Batas dari Desa Wonosalam sendiri adalah:

Sebelah Utara : Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam
Sebelah Timur : Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam
Sebelah Selatan : Desa Samberjo Kecamatan Wonosalam
Sebelah Barat : Desa Glaran Kecamatan Bareng

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada proposal penelitian ini terdiri dari Bab I sampai dengan Bab V dengan uraian materi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang dari penelitian, identifikasi masalah serta selanjutnya menentukan rumusan masalah, tujuan, sasaran serta ruang lingkup baik ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah serta kerangka pemikiran dari penyusunan laporan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi beberapa tinjauan teori serta konsep yang mendukung pembahasan terhadap penelitian, antara lain: pola permukiman pedesaan dan hutan, masyarakat, sistem sosial, budaya dan ekonomi serta tinjauan studi terdahulu yang mendukung penyusunan laporan penelitian ini.

Dalam bab dua dibagi menjadi tiga sub-bab. Sub-bab pertama menguraikan pemahaman tentang kondisi fisik hutan, yang terdiri atas definisi hutan, kerusakan hutan yang meliputi degradasi dan deforestasi, analisis akar masalah kerusakan hutan, penentuan fungsi kawasan dan pembagian hutan produksi. Sub-bab kedua membahas tentang Penentuan Fungsi Kawasan Hutan dan Pembagian hutan Produksi berdasarkan jenisnya. Sub-bab ketiga membahas tentang pengelolaan bersama *(collaborative management)*. Sub bab empat membahas tentang analisis dan alternatif strategi pengelolaan hutan. Sub bab kelima menguraikan tentang tinjauan studi terdahul. Empat sub-bab pertama dalam pembahasan tersebut pada dasarnya merupakan kerangka teori yang dijadikan landasan peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi metode yang digunakan, mulai dari metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel dan metode analisis yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi tentang hasil survey primer maupun sekunder yang dianalisis meliputi analisis sosial ekonomi dan budaya masyarakat terdiri dari mata pencaharian, struktur masyarakat, tingkat pendapatan, serta sistem kegiatan masyarakat setempat dianalisis dengan metoda analisis deskriptif.. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang mendiami kawasan studi. Analisa persepsi masyarakat dan pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan masukan tentang pengelolaan hutan yang selama ini telah dijalankan dan penyelenggaraan pengelolaan hutan secara bersama dan mengidentifikasi persoalan kerusakan hutan yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang selama ini dijalankan. Analisis fisik kawasan terdiri dari analisis tata guna lahan, analisis

overlay dengan menggunakan peta. Tujuan dari analisis fisik kawasan adalah untuk mengetahui karakteristik kawasan, sehingga dapat diketahui permasalahan yang ada di kawasan studi. Sedangkan teknik everlay untuk mengetahui lokasi rawan bencana yang terdapat di kawasan Hutan Wonosalam. Selain itu analiasis lokasi kerusakan lahan juga menggunakan teknik Foto Mapping. Penggunaan teknik ini dapat berguna sebagai dokumen, dan untuk mempermudah serta memperjelas tentang kondisi eksisting, khususnya potensi dan masalah yang terdapat di kawasan hutan Desa Wonosalam. Sedangkan untuk rencana pengembangan hutan berbasis masyarakat menggunakan analisis evaluative dengan SWOT dan AHP. Analisis ini digunakan dalam menginterpretasikan wilayah perencanaan, khususnya pada kondisi yang sangat kompleks dimana faktor eksternal dan internal memegang peran yang sama pentingnya untuk mengetahui arahan pengembangan yang tepat sesuai dengan faktor pendukung dasn penghambat suatu kegiatan.

BAB V KESIMPULAN

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Untuk arahan pemanfaatan hutan produksi di Desa Wonosalam dibagi menjadi dua menurut kepemilikan hutan, yaitu hutan kawasan milik pemerintah dan hutan masyarakat.. dan saran untuk yang di harapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait dan masyarakat setempat. Sedangkan saran untuk pihak terkait yaitu Pemda, Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan.

1.7 Kerangka pemikiran

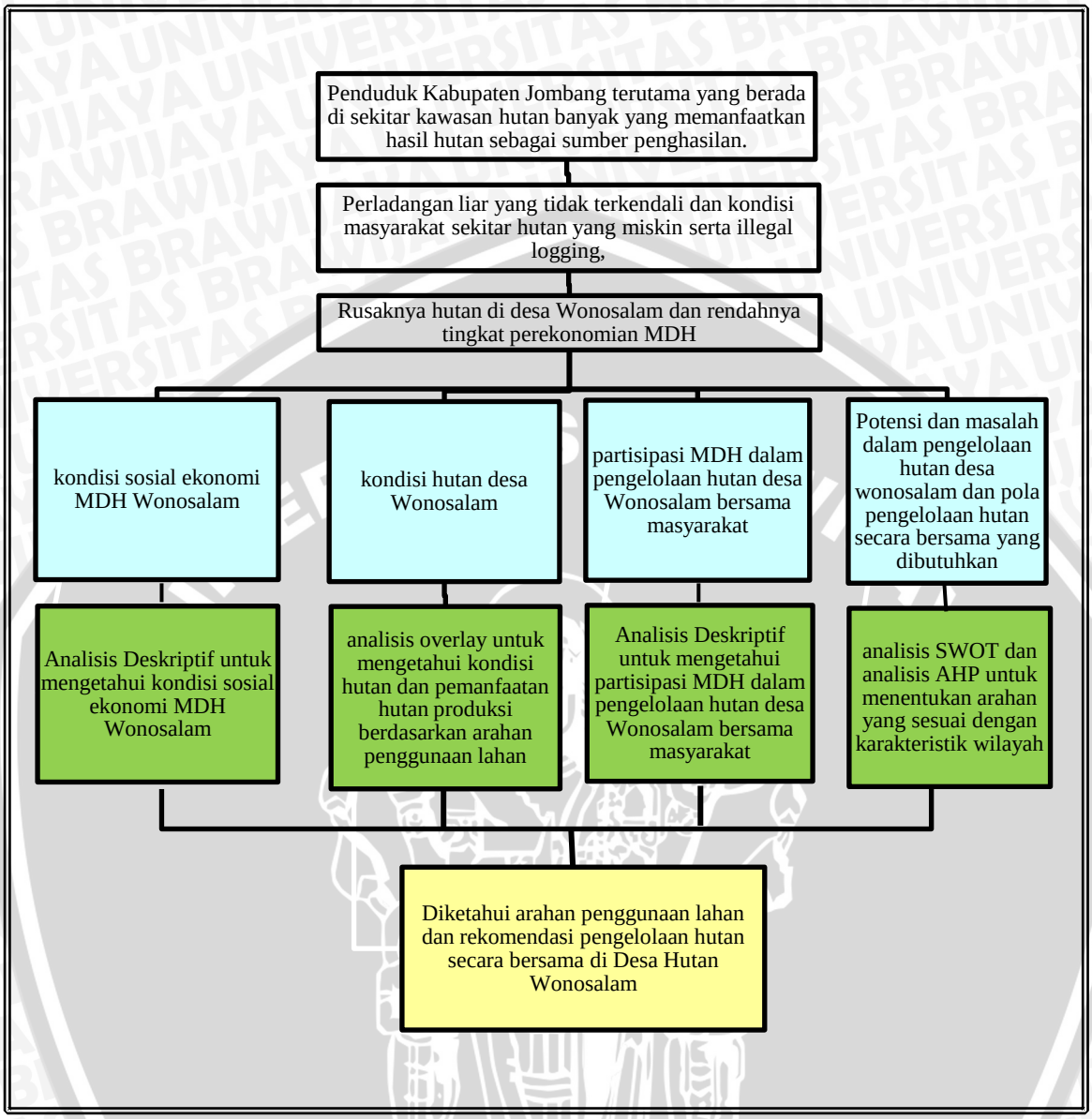

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran